



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
UNIT KERJA : DINAS PERDAGANGAN

I. DATA PRIBADI

- Nama : ARLIN ARIESTA
- Jabatan : KEPALA DINAS
- NHK : 669207

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.000.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 95 m2/60 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 375 m2/225 m2 di KAB / KOTA SIDENRENG RAPPANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	115.000.000
1. MOTOR, YAMAHA AEROX 155 B65/SOLO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 22.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA XMAX XMAX C Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA NMAX 155 C Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 33.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	50.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	304.232.456
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	2.469.232.456
III. HUTANG	Rp.	224.827.510
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.244.404.946

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.